

Penguatan *Civic Disposition* Melalui Praktik Pedagogik Partisipatif: Analisis Literatur Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Silvia Rahmelia

(Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, silviarahmelia3@gmail.com)

Rian Nurizka

(Universitas PGRI Yogyakarta, rian@upy.ac.id)

Chris Apandie

(Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, capandie@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran praktik pedagogik partisipatif dalam menguatkan *civic disposition* peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Civic disposition* dipahami sebagai seperangkat sikap, nilai, dan karakter kewargaan yang menopang tanggung jawab sosial, partisipasi demokratis, kepatuhan hukum, toleransi, serta kepedulian terhadap persoalan publik. Mencermati konteks globalisasi dan era *post-truth*, *civic disposition* tidak hanya mencakup nilai kewarganegaraan nasional, tetapi juga nilai kewargaan global seperti empati lintas budaya, solidaritas internasional, kesadaran ekologis, literasi digital kritis, dan kepedulian terhadap isu global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen akademik yang relevan dengan *civic disposition*, pendidikan karakter, pedagogi partisipatif, dan *Global Citizenship Education*. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahap pengkodean, pengelompokan tema, dan penarikan makna konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran reflektif, diskusi deliberatif, proyek sosial, literasi media, *service learning*, dan pembelajaran berbasis masalah mampu memperkuat tanggung jawab, toleransi, kepedulian, partisipasi aktif, empati lintas budaya, dan kesadaran global peserta didik. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan *civic disposition* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kognitif, tetapi memerlukan pengalaman belajar yang partisipatif, kontekstual, reflektif, dan terbuka terhadap isu global. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan PKn transformatif yang memadukan nilai Pancasila, kewargaan demokratis, literasi digital, dan *Global Citizenship Education*.

Kata kunci: *Civic disposition*, Pedagogik partisipatif, Pendidikan Kewarganegaraan, *Global Citizenship Education*, Pembelajaran reflektif

Abstract

This study aims to analyze the role of participatory pedagogical practices in strengthening students' civic disposition through Civic Education learning. Civic disposition is understood as a set of civic attitudes, values, and character traits that support social responsibility, democratic participation, law-abiding behavior, tolerance, and concern for public issues. In the context of globalization and the post-truth era, civic disposition is not limited to national citizenship values. It also includes global citizenship values such as cross-cultural empathy, international solidarity, ecological awareness, critical digital literacy, and concern for global issues. This study employed a qualitative approach with a library research method. The data sources consisted of national and international journal articles, scholarly books, research reports, and academic documents relevant to civic disposition, character education, participatory pedagogy, and Global Citizenship Education. The data were analyzed using thematic analysis through coding, theme categorization, and conceptual interpretation. The findings show that reflective learning, deliberative discussion, social projects, media literacy, service learning, and problem-based learning can strengthen students' responsibility, tolerance, care, active participation, cross-cultural empathy, and global awareness. These findings confirm that strengthening civic disposition cannot rely solely on cognitive approaches. It requires participatory, contextual, reflective, and globally oriented learning experiences. This study contributes to the development of transformative Civic Education by integrating Pancasila values, democratic citizenship, digital literacy, and Global Citizenship Education.

Keywords: *civic disposition, participatory pedagogy, Civic Education, Global Citizenship Education, reflective learning*

PENDAHULUAN

Civic disposition sebagai bagian dari kerangka konseptual utuh pengembangan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) menurut Branson (Wahab & Sapriya, 2011) telah mengarahkan penguatan karakter kewarganegaraan ke dalam diskursus yang krusial. Dalam konteks Indonesia, *civic disposition* (watak/karakter kewarganegaraan) menjadi semakin relevan mengingat tantangan yang dihadapi bangsa dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus membangun karakter warga negara yang demokratis dan berintegritas.

Urgensi penguatan *civic disposition* semakin nyata ketika pembentukan karakter kewarganegaraan melalui proses pembelajaran dinilai kurang optimal dalam praktik pendidikan (Latipa et al., 2022). Hal ini diperparah dengan munculnya berbagai tantangan seperti disintegrasi sosial, degradasi moral peserta didik, penurunan partisipasi politik generasi muda, hingga polarisasi identitas yang mengancam integrasi nasional. Dalam konteks global maupun nasional, *civic disposition* menjadi semakin penting karena kewarganegaraan kontemporer tidak lagi terbatas pada dimensi legal formal tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan moral yang kompleks di dalam interaksi warga negara.

Salah satu hasil penelitian yang menyajikan temuan dampak Pendidikan Kewarganegaraan terhadap *civic disposition* dijelaskan bahwa *civic disposition* dipahami sebagai sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung partisipasi demokratis dan tanggung jawab sosial (Geboers et al., 2013). Di sisi lain pemerintah Indonesia sendiri telah menginisiasi berbagai kebijakan untuk memperkuat *civic disposition* melalui berbagai program penguatan karakter secara spesifik terhadap peserta didik di persekolahan. Namun kemudian PPKn sendiri semestinya melepaskan diri dari kepentingan rezim yang bersifat sementara dan mengembalikan PPKn pada nilai-nilai konstitusional Pancasila guna membentuk warga negara yang kritis, partisipatif dan demokratis.

Civic disposition atau karakter kewarganegaraan dapat dipahami sebagai seperangkat disposisi atau sifat mental dan moral yang stabil, yang mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab sebagai warga negara dalam masyarakat demokratis. *Civic disposition* merupakan konsep sentral dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang merujuk pada sikap, nilai, dan disposisi yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik (Mulyono, 2017a). Menurut Branson, *civic disposition* merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang esensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan, bersama dengan *civic knowledge* dan *civic skills* (Branson, 1999; Wahab & Sapriya, 2011).

Branson juga membagi karakter kewarganegaraan ini ke dalam karakter publik dan karakter privat. Pengklasifikasian watak privat dan watak publik dalam *civic disposition* adalah penting sebagai panduan setiap warga negara di dalam kehidupannya.

1. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, penghargaan terhadap harkat martabat manusia dan kemandirian

2. Karakter publik seperti kepedulian sebagai warga negara, menghormati aturan hukum, berpikir kritis, kesopanan, kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Kedua karakter ini saling bergantung dan memperkuat. Karakter privat yang kuat (seperti disiplin diri dan tanggung jawab moral) adalah fondasi yang diperlukan untuk mewujudkan karakter publik (seperti kepedulian sosial dan menghormati hukum). Seorang individu yang tidak memiliki disiplin diri dan tanggung jawab moral akan sulit untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan peduli terhadap kepentingan umum.

Berkenaan dengan pemisahan karakter di atas, terdapat skema yang familiar untuk menjelaskan secara defintif terkait karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) jika dibandingkan dengan kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*). Perbedaan utamanya adalah *civic disposition* lebih mengacu pada watak atau karakter seorang warga negara (termasuk pengetahuan dan keterampilan), sedangkan *civic virtue* adalah kebajikan atau nilai-nilai yang lebih spesifik yang mencakup kesediaan untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. *Civic virtue* adalah salah satu aspek dari *civic disposition*, yaitu sebuah watak yang mengutamakan kebajikan kewarganegaraan. Lebih spesifik *civic virtue* berfokus pada nilai-nilai seperti kesediaan untuk mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, sebagaimana skema berikut.



Gambar 1 Kerangka Epistemologi-Pedagogi PPKn (Winataputra, 2015)

Di dunia yang semakin terhubung, kerangka karakter kewarganegaraan juga diperluas menjadi karakter kewarganegaraan global (*global citizenship*), yang mencakup empati dan tanggung jawab melampaui batas-batas nasional, serta literasi digital untuk berpartisipasi dalam wacana publik secara santun dan kritis. Pembentukan karakter kewarganegaraan tidak dapat hanya mengandalkan metode ceramah dan hafalan, tetapi memerlukan pendekatan pedagogik yang transformatif dan partisipatoris. Praktik pedagogik yang efektif adalah yang menciptakan "laboratorium demokrasi" di dalam

kelas, di mana mahasiswa dapat mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara langsung. Praktik pedagogik dalam membentuk karakter kewarganegaraan juga harus disesuaikan dengan karakteristik setiap jenjang. Di jenjang SD, metode yang efektif adalah pembiasaan (*habituation*), keteladanan guru, cerita bernilai moral (*storytelling*), dan permainan peran (*role-play*) tentang situasi sehari-hari. Pembelajaran terintegrasi melalui proyek sederhana seperti merawat tanaman kelas atau mengumpulkan dana untuk teman yang sakit dapat menanamkan rasa tanggung jawab dan kepedulian.

Pada Jenjang SMP dan SMA, pedagogi harus berkembang menjadi *inquiry-based learning* dan diskusi deliberatif. Siswa diajak untuk menganalisis kasus-kasus aktual di masyarakat, seperti kasus *bullying*, hoaks, atau masalah lingkungan (Joseph & Mikel, 2014). Model pembelajaran seperti *Project-Based Learning* (PjBL) dengan tema kewarganegaraan (misalnya, kampanye anti-*bullying* atau pemantauan kebersihan lingkungan) sangat efektif untuk melatih kerja sama, negosiasi, dan kepemimpinan. Di sinilah keterampilan mendengarkan secara hormat dan berargumentasi dengan santun (*civility*) benar-benar dilatih.

Untuk Perguruan Tinggi, pendekatan pedagogiknya harus bersifat transformatif dan memberdayakan. Metode debat dapat digunakan untuk menggali fondasi filosofis dari nilai-nilai konstitusi. Kemudian *service-learning* juga dapat dilakukan agar mahasiswa tidak hanya melakukan pengabdian tetapi juga meneliti akar permasalahan dan dampak kebijakan secara kritis. Sebagai calon sarjana dan profesional, mahasiswa didorong untuk mengambil peran sebagai pemroduksi pengetahuan yang mampu menginisiasi aksi kolektif untuk kebaikan bersama, sehingga karakter kewarganegaraan mereka terwujud dalam tindakan nyata yang berdampak sosial.

Mencermati konteks globalisasi dan era *post-truth*, penguatan *civic disposition* dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu diperluas dari orientasi nasional menuju orientasi nasional ke global. Peserta didik tidak hanya perlu dibentuk sebagai warga negara yang bertanggung jawab, partisipatif, dan taat hukum, tetapi juga sebagai warga global yang memiliki empati lintas budaya, solidaritas kemanusiaan, kesadaran ekologis, dan literasi digital kritis. Perluasan ini penting karena persoalan kewarganegaraan abad ke-21 tidak lagi terbatas pada isu lokal dan nasional. Isu perubahan iklim, konflik kemanusiaan, migrasi, ketimpangan global, disinformasi, dan polarisasi digital menuntut warga negara yang mampu berpikir kritis, berdialog lintas budaya, dan bertindak secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, *Global Citizenship Education* menjadi perspektif penting untuk memperkuat relevansi PKn dalam membentuk warga negara Indonesia yang berakar pada Pancasila sekaligus memiliki kepedulian terhadap persoalan global.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana praktik pedagogik partisipatif dalam pembelajaran PKn berkontribusi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik. Berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis yang

telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana internalisasi nilai moral dalam pengembangan *civic disposition*?; 2) Bagaimana partisipasi aktif warga negara dijalankan sebagai bagian dari bentuk *civic disposition* yang berkembang pada peserta didik?; 3) Bagaimana implikasi dan kontribusi analisis dalam melihat kajian PKn di masa mendatang?

Secara teoretis, kajian ini memperkaya diskursus Pendidikan Kewarganegaraan dengan menempatkan *civic disposition* sebagai inti pembelajaran, bukan sekadar pelengkap dari *civic knowledge* dan *civic skills*. Artikel ini juga berkontribusi pada penguatan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan transformatif yang menekankan keterpaduan antara nilai, sikap dan tindakan kewarganegaraan. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan rujukan bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam merancang pembelajaran yang lebih partisipatif, reflektif dan kontekstual guna membentuk karakter kewarganegaraan peserta didik. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan PKn secara khusus mengenai *civic disposition*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis, sintesis dan interpretasi berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan *civic disposition* dan praktik pedagogik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sumber data penelitian berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas *civic disposition*, pendidikan karakter dan pedagogi partisipatif (Hasil Kajian Terlampir). Pemilihan sumber dilakukan secara *purposive* berdasarkan relevansi topik dan kredibilitas publikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnal daring dan pengkajian dokumen secara sistematis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif secara tematik, meliputi tahap pengkodean, pengelompokan tema, serta penarikan makna konseptual. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan penelusuran sumber, perbandingan antar temuan penelitian, serta konsistensi interpretasi dengan kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internalisasi Nilai Moral dalam Pengembangan *Civic Disposition*

Internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn dapat dipahami sebagai proses di mana nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati, toleransi, dan partisipasi sosial menjadi bagian dari diri peserta didik, bukan hanya dipahami secara konseptual, melainkan dihayati dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kajian oleh Purba (2024)

ditemukan bahwa pembelajaran PKn yang ramah nilai mampu memperkuat karakter moral siswa melalui pendekatan kurikulum holistik dan pembelajaran *student-centred* (Khairani & Purba, 2024). Kemudian terkait dengan urgensinya bahwa degradasi moral dan karakter di jenjang sekolah menjadi tantangan nyata, sehingga PKn tidak hanya mengejar aspek kognitif (pengetahuan kewarganegaraan) tetapi juga afektif dan konatif (sikap dan perilaku).

Internalisasi nilai-nilai moral dalam konteks pendidikan kewarganegaraan merupakan proses yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dipisahkan dari pembentukan kebijakan kewarganegaraan (*civic virtues*). Nilai-nilai seperti keadilan, empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial menjadi komponen fundamental dalam pembentukan warga negara yang bermoral. Internalisasi moral yang efektif terjadi ketika pembelajaran mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu *knowing the good, desiring the good, dan doing the good* (Berkowitz & Bier, 2004; Lickona, 1996). Dalam konteks PKn, pendekatan pembelajaran ini tidak hanya mentransmisikan nilai, tetapi juga membangun refleksi moral dan keterlibatan sosial. Misalnya, diskusi dilema moral dan pembelajaran berbasis proyek sosial (*service learning*) yang terbukti dapat memperkuat kesadaran moral sekaligus kemampuan berpikir kritis siswa terhadap persoalan publik. Dengan demikian, pembelajaran PKn sebaiknya dirancang tidak sekadar normatif, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter melalui pengalaman moral yang kontekstual dan reflektif.

Pendekatan pedagogis yang bermakna menjadi kunci keberhasilan dalam menginternalisasi nilai-nilai moral di sekolah. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah bahwa dalam kerangka dasar dan tujuan kurikulum menempatkan *kewarganegaraan* sebagai salah satu dari delapan dimensi profil lulusan. Peraturan tersebut menekankan bahwa pendidikan harus membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter Pancasila, beriman, bertakwa, berintegritas, empatik, adil, serta berkomitmen terhadap kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang damai serta berkeadaban. Pendekatan *pembelajaran mendalam* yang diatur dalam peraturan ini turut mendukung pengembangan *civic disposition* melalui proses reflektif, kolaboratif, dan kontekstual yang mengintegrasikan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga dalam satu kesatuan pengalaman belajar (Komalasari & Sapriya, 2016; Muetteties, 2024). Selain itu, kegiatan *ekstrakurikuler* memiliki fungsi sosial dan pengembangan karakter yang memperkuat rasa tanggung jawab, kepemimpinan, dan partisipasi sosial peserta didik sebagai warga negara yang aktif dan peduli. Dengan demikian, penerapan peraturan tersebut menegaskan bahwa pembentukan *civic disposition* merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan nasional yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Faktor konteks institusional dan budaya sekolah memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan

internalisasi nilai-nilai moral. Sekolah dengan budaya demokratis, partisipatif, dan konsisten dalam menegakkan norma moral menunjukkan hasil yang lebih baik dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini sejalan dengan temuan Narvaez dan Lapsley bahwa setiap praktik pendidikan sejatinya sudah sarat dengan nilai moral, sehingga persoalannya bukan apakah guru harus mengajarkan nilai, tetapi bagaimana mereka dilatih untuk melakukannya dengan sadar dan bertanggung jawab (Narvaez & Lapsley, 2008). Narvaez dan Lapsley (2008) menawarkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan minimalis, yang melihat bahwa pendidikan karakter dapat tumbuh melalui praktik pengajaran terbaik seperti membangun iklim kelas yang peduli dan mengembangkan keterampilan sosial-emosional serta pendekatan maksimalis, yang menuntut guru untuk secara eksplisit merancang pembelajaran moral menggunakan model *Integrative Ethical Education (IEE)*. Model ini meliputi lima langkah yaitu 1) menciptakan iklim yang suportif; 2) mengembangkan keterampilan etis; 3) menggunakan pendekatan *apprenticeship* (bimbingan bertahap); 4) melatih regulasi diri dan; 5) membangun kolaborasi dengan komunitas. Melalui dua pendekatan ini, Narvaez dan Lapsley menekankan bahwa guru bukan hanya pengajar pengetahuan, tetapi juga pembimbing moral yang secara sadar menumbuhkan karakter dan tanggung jawab etis siswa dalam konteks pendidikan demokratis.

Analisis terhadap berbagai publikasi mutakhir lainnya menunjukkan munculnya tren baru dalam pendidikan moral, yaitu integrasi dimensi digital dan global. Konsep *digital citizenship education* dan *global citizenship education (GCE)* kini mulai menggabungkan nilai-nilai moral dengan kompetensi digital dan kesadaran global. Melalui pendekatan ini, siswa diajak memahami tanggung jawab moral dalam ruang digital, seperti kejujuran informasi, etika berkomunikasi daring, dan partisipasi sosial di dunia maya. Namun, dari bukti empiris tentang efektivitas pendidikan moral berbasis digital masih terbatas, terutama dalam konteks jangka panjang dan keberlanjutan pembentukan disposisi moral siswa.

Implikasi penting bagi pengembangan pembelajaran PKn di Indonesia. Pertama, sesuai Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, pendekatan integratif yang memadukan *meaningful, mindful, dan joyful learning* terbukti mampu menghubungkan ranah kognitif, afektif, dan konatif dalam pendidikan moral. Hal ini menunjukkan bahwa PKn perlu direorientasi dari pembelajaran yang bersifat hafalan dan normatif menuju pembelajaran yang reflektif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Implementasi proyek sosial, debat etis, atau kegiatan pengabdian masyarakat dapat menjadi wahana efektif bagi siswa untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan kewarganegaraan.

Kedua, penguatan kapasitas guru menjadi elemen yang sangat strategis. Guru PKn perlu dibekali kemampuan merancang pembelajaran yang menantang secara moral dan menginspirasi secara emosional. Sejalan dengan kebijakan *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)* dari Kementerian Pendidikan, upaya membangun warga negara yang cerdas dan berkarakter memerlukan

transformasi paradigma pengajaran dari sekadar transfer pengetahuan menuju fasilitasi pembentukan moralitas. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi arena penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang mendalam untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab.

Internalisasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses yang kompleks dan berlapis, yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Internalisasi nilai tidak cukup melalui pengajaran normatif atau instruksional semata, melainkan membutuhkan keterlibatan reflektif, emosional, dan sosial siswa dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial terbukti lebih efektif diinternalisasi ketika disampaikan melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif (Lickona, 1996)

Selain itu, pendekatan *meaningful, mindful, dan joyful learning* menjadi kunci utama dalam mengembangkan proses internalisasi yang berkelanjutan. Pembelajaran bermakna memberikan relevansi antara konsep moral dan pengalaman hidup siswa, untuk pembelajaran berkesadaran mengasah kepekaan dan empati, sementara pembelajaran yang menggembirakan dengan membangun keterlibatan emosional positif. Ketiga pendekatan ini, jika diintegrasikan secara utuh, dapat menumbuhkan *moral disposition* yang stabil dan konsisten dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak boleh dipahami hanya sebagai pengajaran hukum dan kewajiban warga negara, tetapi sebagai upaya membangun integritas moral dan kebajikan publik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Mencermati konteks globalisasi dan transformasi digital, kebijakan pendidikan perlu memasukkan dimensi *digital citizenship education* sebagai bagian dari pembentukan moral warga negara di era teknologi. Tantangan etika dalam dunia maya, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, menuntut pendekatan baru dalam pendidikan moral yang berbasis literasi digital dan kesadaran etika global (Chianese & Bombardelli, 2024). Sellami, A., et al. mengembangkan *makerspaces* dengan pendekatan *human-centred design*, artinya setiap aktivitas kreatif diarahkan tidak hanya untuk membuat produk, tetapi juga untuk memecahkan masalah nyata manusia dan masyarakat misalnya isu keberlanjutan, etika digital, atau solidaritas global (Sellami et al., 2025). Oleh karena itu, internalisasi nilai moral dalam PKn harus terus berkembang mengikuti dinamika sosial, teknologi, dan budaya, agar tetap relevan dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab sebagai warga dunia.

Perluasan Civic Disposition dalam Perspektif Global Citizenship Education

Civic disposition dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak dapat dipahami hanya sebagai karakter kewarganegaraan yang berorientasi pada ruang nasional.

Kerangka PKn memposisikan *civic disposition* memang mencakup nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, partisipasi demokratis, toleransi, kepedulian sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk warga negara yang baik. Namun, perkembangan masyarakat abad ke-21 menuntut perluasan makna *civic disposition* agar tidak berhenti pada relasi warga negara dengan negara, tetapi juga mencakup relasi warga negara dengan masyarakat global.

Kajian *Global Citizenship Education (GCE)* menegaskan bahwa warga negara abad ke-21 hidup dalam dunia yang semakin saling terhubung. Persoalan sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan budaya tidak lagi dapat dipahami hanya dalam batas lokal atau nasional. Perubahan iklim, konflik kemanusiaan, migrasi, ketimpangan global, penyebaran disinformasi, dan polarisasi identitas merupakan contoh persoalan yang melampaui batas negara. Karena itu, peserta didik perlu dibekali disposisi kewarganegaraan global seperti empati lintas budaya, solidaritas internasional, kesadaran terhadap isu global, kepedulian ekologis, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi. Habibah dan Sapriyah menjelaskan bahwa GCE penting bagi penguatan literasi kewarganegaraan karena mendorong warga dunia untuk berpikir, berbagi, dan bertindak bagi keberlanjutan kehidupan global yang harmonis, toleran, dan bertanggung jawab terhadap isu sosial, politik, ekonomi, serta lingkungan (Maizul Habibah & Sapriya, 2021).

Perluasan *civic disposition* ke dalam perspektif global tidak berarti menggeser orientasi kebangsaan dalam PKn. Sebaliknya, nilai kewarganegaraan global dapat memperkuat nilai kewarganegaraan nasional jika diletakkan dalam kerangka Pancasila. Nilai empati lintas budaya memiliki hubungan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai solidaritas internasional sejalan dengan tanggung jawab moral untuk menghargai martabat manusia. Kesadaran terhadap isu global, seperti lingkungan, perdamaian, dan keadilan sosial, dapat dihubungkan dengan sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar etika yang menghubungkan identitas nasional dengan tanggung jawab global. Kajian Anggaraini, Habibah, dkk menunjukkan bahwa integrasi GCE dalam Pendidikan Pancasila dapat memperkuat sikap multikultural, dialog antarbudaya, kepedulian lingkungan, hak asasi manusia, dan pemecahan masalah kolaboratif tanpa melemahkan identitas nasional (Anggaraini et al., 2025).

Dengan demikian, *civic disposition* perlu dibaca dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah dimensi nasional yang mencakup tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, partisipasi demokratis, toleransi, disiplin diri, dan komitmen terhadap nilai Pancasila. Dimensi kedua adalah dimensi global yang mencakup empati lintas budaya, solidaritas kemanusiaan, kesadaran ekologis, literasi digital kritis, dan kepedulian terhadap persoalan global. UNESCO juga menekankan bahwa kewarganegaraan global tidak menggantikan kewarganegaraan nasional karena keduanya saling memperkuat. *Global Citizenship Education* diarahkan untuk membantu peserta

didik memahami keterhubungan dunia, menghargai keberagaman, berpikir kritis, bekerja sama, dan bertindak untuk menyelesaikan masalah lokal, nasional, maupun global (Chavez, 2025).

Relevansi perluasan ini semakin kuat dalam konteks era *post-truth*. Pada era ini, peserta didik berhadapan dengan disinformasi, manipulasi emosi, ujaran kebencian, propaganda digital, dan polarisasi berbasis identitas. Situasi tersebut menuntut *civic disposition* yang tidak hanya menekankan kepatuhan dan partisipasi, tetapi juga kemampuan menilai informasi secara kritis, menghargai perbedaan pandangan, menahan diri dalam komunikasi publik, dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Oleh karena itu, PKn perlu mengintegrasikan literasi digital kritis sebagai bagian dari pembentukan karakter kewargaan. Peserta didik tidak hanya diajarkan untuk menjadi warga negara yang taat hukum di ruang fisik, tetapi juga warga digital dan warga global yang etis, reflektif, dan bertanggung jawab.

Praktik pedagogik partisipatif dapat menjadi strategi penting untuk mengembangkan dimensi nasional dan global tersebut. Guru PKn dapat menghadirkan diskusi deliberatif tentang isu perubahan iklim, konflik kemanusiaan, intoleransi, migrasi, ketimpangan sosial, dan disinformasi digital. Pembelajaran berbasis proyek dapat diarahkan pada kampanye literasi media, aksi peduli lingkungan, proyek solidaritas sosial, atau kolaborasi dengan komunitas lokal dalam menyelesaikan masalah publik. Sari menegaskan bahwa pembentukan warga global yang inklusif memerlukan tema pembelajaran yang mengangkat keadilan, kesetaraan, keberagaman, dan lingkungan berkelanjutan (Sari, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa GCE tidak cukup dipahami sebagai tambahan materi global dalam PPKn, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam desain pembelajaran, kultur sekolah, dan pengalaman partisipatif peserta didik. Melalui pengalaman belajar seperti ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara kognitif, tetapi juga belajar mempraktikkan empati, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap persoalan bersama.

Dengan demikian, integrasi *Global Citizenship Education* memperkuat relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi globalisasi dan era *post-truth*. PKn tidak lagi cukup dipahami sebagai mata pelajaran yang hanya mengajarkan hak, kewajiban, hukum, dan institusi negara. PKn perlu berkembang menjadi ruang pembentukan warga negara yang memiliki identitas nasional kuat, tetapi juga terbuka terhadap tanggung jawab global. Orientasi ini menegaskan bahwa *civic disposition* bukan hanya watak warga negara yang patuh dan partisipatif dalam kehidupan nasional, tetapi juga watak warga global yang empatik, kritis, solider, dan mampu bertindak secara etis dalam masyarakat dunia yang saling terhubung.

Bentuk Civic disposition yang Berkembang melalui Praktik Pedagogik Partisipatif

Partisipasi aktif warga negara disampaikan oleh Keating dan Janmaat yang menunjukkan bahwa kegiatan

pendidikan kewarganegaraan yang bersifat partisipatif di sekolah seperti pemilihan siswa, debat publik, dan proyek sosial memiliki dampak jangka panjang terhadap keterlibatan politik generasi muda (Keating & Janmaat, 2016). Temuan ini menegaskan bahwa pengalaman partisipatif sejak dini menumbuhkan kesadaran kewargaan dan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan demokratis setelah siswa meninggalkan sekolah. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai laboratorium demokrasi, di mana siswa belajar bernegosiasi, menyampaikan aspirasi, dan menghargai pandangan berbeda. Selain itu, studi ini memperlihatkan bahwa partisipasi yang bermakna di sekolah mendorong *political efficacy*, yaitu keyakinan individu bahwa tindakannya dapat memengaruhi keputusan publik. Konsep ini penting bagi pembangunan masyarakat demokratis karena siswa yang terbiasa aktif dalam kehidupan sekolah cenderung mempertahankan perilaku partisipatif tersebut di ranah publik (Keating & Janmaat, 2016). Dengan demikian, pembelajaran kewarganegaraan yang bersifat reflektif dan aplikatif terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan hafalan nilai-nilai moral atau hukum semata.

Pembelajaran kewarganegaraan aktif melalui *model service learning* dan *democratic culture* yaitu pembelajaran berbasis layanan sosial menjadi media strategis untuk menginternalisasi nilai partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian mereka, mahasiswa yang terlibat dalam proyek komunitas menunjukkan peningkatan empati, kemampuan kolaborasi, dan kesadaran akan isu-isu publik (Celio et al., 2011; Geier & Hasager, 2020). Lebih jauh lagi, pembelajaran kewargaan aktif mendukung lahirnya *culture of democracy*, yakni kebiasaan berpartisipasi dalam diskusi publik, menghargai perbedaan, serta mendorong solusi kolektif terhadap persoalan sosial. Model ini relevan diterapkan dalam konteks sekolah, di mana *civic disposition* dapat dikembangkan melalui proyek kolaboratif antara sekolah dan masyarakat. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan sinergi antara pembelajaran moral dan tindakan nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep partisipasi warga negara tetapi juga mengalami langsung proses demokrasi sosial.

Untuk penguatan *civic identity* di sekolah penelitian oleh Simonova et al. di Republik Ceko mengembangkan model pendidikan kewargaan berbasis komunitas yang mendorong siswa sekolah dasar untuk mengidentifikasi masalah lokal dan merancang solusi nyata (Hoskins et al., 2015; Muettterties, 2024; Simonova et al., 2019). Temuan mereka menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam proyek komunitas meningkatkan *civic identity*, yaitu kesadaran sebagai bagian dari masyarakat dengan tanggung jawab moral terhadap lingkungan sosialnya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa partisipasi warga negara dapat dimulai dari usia dini, asalkan didukung dengan bimbingan reflektif dan kurikulum yang menekankan hubungan antara teori kewargaan dan pengalaman sosial. Hasil penelitian tersebut sangat relevan untuk konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, karena memperlihatkan bagaimana aktivitas

berbasis proyek (*project-based citizenship education*) dapat memperkuat disposisi kewargaan. Siswa yang terlibat dalam kegiatan nyata seperti program kebersihan lingkungan atau kampanye literasi lebih mudah memahami nilai tanggung jawab sosial dan solidaritas komunitas.

Partisipasi aktif warga negara juga dikembangkan pada literasi media, seperti yang diungkapkan oleh Tomé, Lopes, Reis, dan Dias (2019) menyoroti pentingnya *media literacy* sebagai sarana membangun partisipasi aktif sejak usia dini. Melalui proyek komunitas yang melibatkan anak-anak prasekolah dan sekolah dasar, mereka menemukan bahwa kegiatan berbasis media seperti pembuatan video kampanye sosial atau diskusi online mampu menumbuhkan kesadaran anak tentang peran mereka dalam komunitas (Knowles & Suganda, 2023). Proyek ini menggabungkan antara pendidikan moral, literasi digital, dan kewarganegaraan aktif, sehingga anak-anak belajar memahami isu-isu sosial dengan cara yang sesuai usia dan konteks budaya mereka (Hemafitria & Octavia, 2021a; White, 2021). Pendekatan ini menjadi penting di era digital saat ini, di mana ruang publik tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga virtual. Dengan mengembangkan literasi media sejak dini, sekolah dapat menyiapkan generasi muda yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan berani berpartisipasi secara positif di ruang publik digital (Tomé et al., 2019)(Kahne et al., 2022).

Untuk partisipasi publik dan kewargaan di lingkungan masyarakat, penelitian Guo dan Bai menyoroti partisipasi warga negara dalam konteks tata kelola lingkungan di Tiongkok. Mereka menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan (Guo & Bai, 2019). Studi ini menegaskan bahwa partisipasi warga negara di ruang publik merupakan indikator penting dari *civic disposition* yang matang, karena menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan bersama di luar ranah pribadi. Temuan ini memberikan inspirasi bagi pendidikan kewarganegaraan untuk memperluas cakupan pembelajarannya, tidak hanya membentuk siswa sebagai warga negara yang patuh aturan, tetapi juga aktif dalam mengawasi dan memperbaiki kebijakan publik di lingkungan mereka. Dengan demikian, integrasi antara pembelajaran di sekolah dan praktik kewargaan di masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendidikan demokratis (Mulyono, 2017b; Owen, 2015; Veugelers, 2023).

Partisipasi aktif warga negara baik di sekolah maupun di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan kewarganegaraan yang bermakna, reflektif, dan berbasis pengalaman. Sekolah menjadi ruang awal pembentukan *civic disposition*, sementara masyarakat berfungsi sebagai medan praktiknya. Integrasi keduanya menghasilkan warga negara yang kritis, empatik, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial.

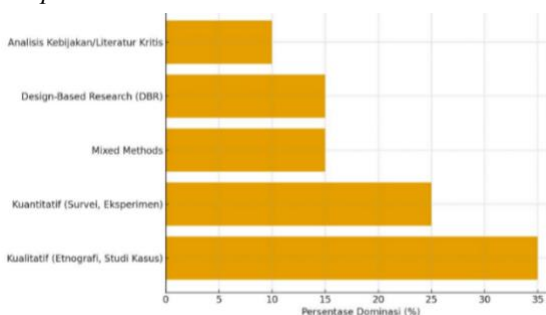
Model pembelajaran yang digunakan dalam pembentukan *civic disposition* banyak dipengaruhi oleh pendekatan berbasis reflektif, partisipatif dan sosial

konstruktivis. Zhang, Quaranta, dan Triventi melalui studi mereka menunjukkan bahwa pembentukan minat politik dan disposisi kewarganegaraan di sekolah bergantung pada model pembelajaran yang berorientasi pada *student agency* dan *reflective inquiry* (Zhang et al., 2025). Dalam konteks tersebut, guru mendorong peserta didik untuk mengaitkan pengalaman personal dengan isu publik melalui diskusi terbuka dan debat berbasis masalah. Model ini memungkinkan internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan secara alami melalui pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*). Selain itu, penelitian de Ruyter juga menekankan pentingnya model pembelajaran berbasis *flourishing education* yang menumbuhkan refleksi moral dan keterlibatan sosial (D'Olimpio & de Ruyter, 2025). Model ini menempatkan peserta didik bukan sekadar sebagai penerima nilai, tetapi sebagai subjek aktif yang mengonstruksi pemahaman kewarganegaraan melalui praktik reflektif dan dialogis. Pembelajaran reflektif dalam konteks ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan *civics*, tetapi juga membentuk disposisi afektif seperti empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran moral terhadap komunitas.

Sementara itu Soy, Nayak, dan Aggarwal dalam penelitian *Structural Equation Modelling of Community Participation* menegaskan bahwa pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek masyarakat berperan penting dalam membangun *civic engagement* (Nur Fadhillah, 2020; Soy et al., 2025). Model ini menghubungkan teori kewarganegaraan dengan praktik nyata di lingkungan sosial, memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai demokratis secara langsung. Pembelajaran semacam ini sejalan dengan teori *experiential learning* dari Kolb yang menekankan bahwa refleksi atas pengalaman sosial merupakan kunci pembentukan *civic disposition* yang stabil.

Implikasi dan Kontribusi Analisis dalam Melihat Kajian PKn di Masa Mendatang

Analisis kritis dari berbagai literatur dan hasil penelitian, didapati grafik sebagai berikut yang memperlihatkan arah kecenderungan penelitian terkait *civic disposition*.



Gambar 2. Tren Dominasi Penelitian *Civic Disposition*

Tampak bahwa pendekatan kualitatif mendominasi lanskap penelitian dengan porsi sekitar 35%. Metode ini menonjol karena kemampuannya dari segi pengumpulan data dengan menggali konteks sosial, nilai-nilai lokal, dan pengalaman hidup peserta didik secara mendalam.

Penelitian kualitatif terutama etnografi dan studi kasus (sebagaimana variasi artikel terlampir) memberi ruang bagi eksplorasi makna kewargan yang hidup dalam praktik keseharian. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dan eksperimen menempati posisi kedua dengan sekitar 25%. Metode ini digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel seperti pengaruh pembelajaran PKn, kompetensi guru, atau model pendidikan terhadap *civic disposition*. Hasil kuantitatif memungkinkan peneliti membuktikan signifikansi pengaruh secara statistik, meskipun sering kali kurang menangkap kedalaman konteks sosial. Selanjutnya, metode campuran (*mixed methods*) dan *Design Based Research* atau penelitian yang menghasilkan produk seperti pada penelitian pengembangan menunjukkan tren yang meningkat dengan porsi 15%. Terakhir analisis kebijakan dan literatur kritis menyumbang sekitar 10%. Dari grafik tersebut dapat ditafsirkan sebuah implikasi bahwa riset *civic disposition* bergeser dari paradigma deskriptif menuju paradigma reflektif dimana dikedepankan pengalaman peserta didik sebagai warga negara.

Setidaknya dalam 5 (lima) tahun mendatang, kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) akan banyak menyesuaikan diri dengan disiplin ilmu Psikologi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini disebabkan interaksi warga negara yang banyak dipengaruhi oleh digitalisasi dan perkembangan *global citizenship* yang mengintegrasikan ranah moral, sosial-politik, hingga kajian kearifan lokal.

Secara teoritis dari analisis tentang *civic disposition* di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum PKn ke depan harus berorientasi kepada pengalaman (*experiential learning*). Dalam konteks Pendidikan Tinggi dapat dikembangkan KKN Tematik, PkM berbasis *Participatory Action Research*. Di tingkat persekolahan guru perlu peningkatan kompetensi dalam pengukuran/asesmen karakter siswa berbasis digital atau lebih jauh lagi dapat menggunakan *artificial intelligence* untuk memetakan perkembangan *civic disposition* siswa secara lebih personal agar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tidak berarti menggantikan peran guru, tetapi menempatkan teknologi sebagai mitra reflektif bagi pendidik dalam memahami dinamika moral dan sosial peserta didik di ruang belajar digital. Watak publik seperti kepedulian sebagai warga negara dan sikap menghormati aturan hukum dapat diperkuat melalui partisipasi demokrasi di sekolah misalnya pemilu OSIS atau Dewan Mahasiswa. Kemudian dapat pula melalui program komunitas yang mendorong peningkatan akuntabilitas peserta didik dan mengembangkan partisipasi lokal (Finkel & Lim, 2021; Schulz et al., 2022).

Konteks Indonesia, praktik baik yang diadopsi di sekolah secara khusus di dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah dengan menyisipkan debat terstruktur tentang isu hak, kebhinekaan, lingkungan dan isu kenegaraan lainnya dengan mengintegrasikan berbagai literatur Indonesia. Sebagaimana kompilasi penelitian ICCS (Schulz et al., 2022; Treviño et al., 2021), diskusi dengan cara menautkan persepsi peserta didik dengan konteks lokal dan demokrasi sekolah dapat melatih

pengembangan karakter publik seperti kompromi, gotong royong dan kepatuhan terhadap aturan hukum pengembangan watak privat (tanggung jawab moral, disiplin diri, empati) diperkuat melalui program P5 bertema budaya/kearifan lokal dan proyek layanan. Salah satu penelitian di sekolah dasar/menengah menunjukkan peningkatan disiplin/kemandirian dan etos kerja siswa saat proyek dikelola dengan *milestones* dan refleksi yang jelas (Muhassanah et al., 2024). Dapat pula dikembangkan menggunakan instrumen Kuesioner Tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila" (KT P5) yang memudahkan monitoring kemajuan karakter per tema, menggunakan rubrik yang menilai kerja sama, empati, inisiatif publik dan argumentasi berbasis bukti (Rachman et al., 2024)

Secara umum kajian PKn termasuk *civic disposition* ini juga masih diminati ketika mengkontekstualisasikannya dengan kearifan lokal. Kontribusi penting bagi pengembangan PKn ke depan dalam hal ini adalah penguatan dimensi *co-production of civic knowledge* (Hemafitria & Octavia, 2021b; Honingh et al., 2020; Yua et al., 2022) antara sekolah, komunitas, dan lembaga-lembaga sosial. Barangkali ini lebih relevan masuk dalam konteks PKn di Pendidikan Tinggi karena dapat diintegrasikan dengan *service learning* (KKN Tematik) misalnya dengan *community based learning*. Praktik yang direkomendasikan untuk menguatkan *civic disposition* adalah melalui program *service learning* (SL). Meta-analisis terhadap 62 penelitian dengan total 11.837 peserta (umumnya siswa sekolah dan mahasiswa) telah mengevaluasi pengaruh pendidikan kewarganegaraan berbasis pengalaman seperti SL atau proyek komunitas lainnya terhadap berbagai indikator watak kewarganegaraan (misalnya empati, tanggung jawab sosial, partisipasi, dan orientasi moral) (Celio et al., 2011). Tipe pembelajaran seperti ini didukung oleh penelitian lanjutan yang mengatakan bahwa program Pendidikan Kewarganegaraan untuk orang dewasa (PKn di Perguruan Tinggi) efektif dalam membangun pengetahuan politik, efikasi, dan partisipasi, yang merupakan fondasi dari *civic disposition* (Finkel, 2014). Namun kemudian Finkel mensyaratkan dalam penelitiannya bahwa faktor yang memperkuat dampak pada *civic disposition* adalah frekuensi partisipasi, metode partisipasi dan kualitas fasilitator.

Oleh karena itu, PKn lima tahun ke depan perlu membangun kemitraan lintas sektor dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas adat dan lembaga publik sebagai ruang praktik kewarganegaraan, atau jika ingin lebih komprehensif dapat melanjutkan kajian-kajian yang relevan dengan strategi *quadrohelix* ataupun *pentahelix*. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang demokrasi, tetapi hidup di dalamnya melalui aksi nyata yang melatih empati sosial, kemandirian, hingga tanggung jawab publik, yang relevan dengan karakter publik dan karakter privat dalam *civic disposition*.

Namun kemudian yang harus juga menjadi *concern* adalah corak PKn yang relevan dengan Pancasila serta kerangka konstitusional Indonesia yang memetakan indikator warga negara seperti apa yang ingin dibentuk di

Indonesia. Jika PKn Indonesia selama ini berkaca pada Amerika, maka kerangka NAEP (The National Assessment of Educational Progress) yang menegaskan *civic dispositions* sebagai *‘habits of the heart’* terbukti mampu menopang partisipasi, kompromi, dan pengelolaan konflik diantara warga negara (Engler et al., 2018). NAEP secara jelas memetakan *civic disposition* yang akan dibentuk di Amerika. Barangkali dalam hal ini Indonesia dapat meramu corak-corak kearifan lokal yang ada sebagai titik tolak habituasi atau pembelajaran moral peserta didik dalam mengembangkan *civic disposition* warga negara. Sehingga bukan hanya bertolak dari cita-cita nasional semata.

Akhirnya secara teoretis, hasil kajian ini menegaskan bahwa PKn masa depan harus mengarah pada paradigma *transformative civic education*, dengan paradigma baru dalam PKn yang tidak hanya mengedukasi warga negara agar berkontribusi dalam memelihara stabilitas sosial, tetapi juga mendorong keberanian moral untuk menantang ketidakadilan dan intoleransi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, praktik pedagogik partisipatif memiliki peran strategis dalam penguatan *civic disposition* peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Internalisasi nilai moral berlangsung efektif ketika pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan kewargaan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi afektif dan konatif melalui pengalaman belajar yang reflektif, kontekstual, dan partisipatif. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, toleransi, keadilan, kepedulian sosial, dan partisipasi demokratis tidak cukup diajarkan secara normatif. Nilai-nilai tersebut perlu dihidupkan melalui diskusi deliberatif, proyek sosial, pembelajaran berbasis masalah, literasi media, dan *service learning*.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa *civic disposition* dalam PKn kontemporer perlu diperluas dari orientasi nasional menuju orientasi nasional ke global. Peserta didik tidak hanya perlu dibentuk sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap hukum, demokrasi, dan kehidupan sosial bangsa, tetapi juga sebagai warga global yang memiliki empati lintas budaya, solidaritas kemanusiaan, kesadaran ekologis, literasi digital kritis, dan kepedulian terhadap isu global. Perluasan ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Sebaliknya, nilai global seperti perdamaian, kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas dapat memperkuat aktualisasi Pancasila dalam kehidupan dunia yang saling terhubung.

Partisipasi aktif warga negara sebagai wujud *civic disposition* dapat dikembangkan melalui pengalaman langsung dalam laboratorium demokrasi di sekolah. Pemilihan OSIS, debat publik, forum aspirasi siswa, proyek kolaboratif dengan masyarakat, kampanye literasi digital, dan kegiatan lingkungan memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, mengambil keputusan bersama, serta bertindak untuk kepentingan publik. Sekolah

menjadi ruang awal pembentukan karakter kewargaan, sedangkan masyarakat menjadi medan praktik bagi aktualisasi nilai tersebut.

Implikasi kajian ini menegaskan perlunya reorientasi PKn dari pembelajaran normatif dan berbasis hafalan menuju *transformative civic education*. PKn masa depan perlu mengintegrasikan nilai Pancasila, pedagogik partisipatif, literasi digital, kearifan lokal, dan *Global Citizenship Education*. Guru PKn juga perlu diperkuat kapasitasnya sebagai fasilitator moral dan demokratis yang mampu mengelola pembelajaran reflektif, dialogis, serta responsif terhadap isu lokal, nasional, dan global. Sekolah juga perlu membangun budaya demokratis agar peserta didik tidak hanya belajar tentang kewarganegaraan, tetapi mengalami langsung praktik hidup sebagai warga yang bertanggung jawab.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini memberikan saran/rekomendasi sebagai berikut.

1. Guru PKn perlu merancang pembelajaran yang lebih partisipatif melalui diskusi deliberatif, proyek sosial, pembelajaran berba sis masalah, literasi media, dan *service learning*;
2. Sekolah perlu memperkuat budaya demokratis melalui forum partisipasi siswa, kegiatan komunitas, dan proyek kolaboratif yang relevan dengan isu lokal serta global;
3. Pembuat kebijakan perlu menempatkan *civic disposition* sebagai inti pembelajaran PKn, bukan hanya sebagai dampak tambahan dari pengajaran pengetahuan kewarganegaraan;
4. Peneliti PKn perlu mengembangkan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif, campuran, atau longitudinal untuk menguji efektivitas pedagogik partisipatif dalam memperkuat *civic disposition* peserta didik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraini, R., Habibah, S. M., Istianah, A., Sari, B. I., Listyaningsih, L., & Harmanto, H. (2025). Integrating Global Citizenship Education into Pancasila Education: Curriculum Review in Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*, 2(2), 143–155. <https://doi.org/10.52738/bti.v2i2.47>.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). Research Based Character Education. In *Annals of the American Academy of Political and Social Science* (Vol. 591, pp. 72–85). <https://doi.org/10.1177/0002716203260082>.
- Branson, M. (1999). *Belajar “Civic Education” dari Amerika* (dkk Syarifudin, Ed.). LKIS.
- Celio, C. I., Durlak, J., & Dymnicki, A. (2011). A Meta-analysis of the Impact of Service-Learning on Students. *Journal of Experiential Education*, 34(2), 164–181. <https://doi.org/10.5193/jee34.2.164>.
- Chavez, H. (2025). Integrating Global Citizenship Education: A Phenomenological Inquiry. *International Journal of Innovative Science and*

- Research Technology*, 4080–4083. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25may2342>.
- D'Olimpio, L., & de Ruyter, D. J. (2025). Flourishing as an educational aim. *Journal of Philosophy of Education*, 59(3), 626–633.
- Engler, J., Matthews, T., Bushaw, W., & Stooksberry, L. (2018). *CIVICS FRAMEWORK for the 2018 NATIONAL ASSESSMENT OF EDUCATIONAL PROGRESS*.
- Finkel, S. E. (2014). The impact of adult civic education programmes in developing democracies. *Public Administration and Development*, 34(3), 169–181. <https://doi.org/10.1002/pad.1678>.
- Finkel, S. E., & Lim, J. (2021). The supply and demand model of civic education: evidence from a field experiment in the Democratic Republic of Congo. *Democratization*, 28(5), 970–991. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1843156>.
- Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & Dam, G. ten. (2013). Review of the effects of citizenship education. In *Educational Research Review* (Vol. 9, pp. 158–173). <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.02.001>.
- Geier, I., & Hasager, U. (2020). Do Service Learning and Active-Citizenship Learning Support Our Students to Live a Culture of Democracy? *Frontiers in Education*, 5. <https://doi.org/10.3389/educ.2020.606326>.
- Guo, J., & Bai, J. (2019). The role of public participation in environmental governance: Empirical evidence from China. *Sustainability (Switzerland)*, 11(17). <https://doi.org/10.3390/su11174696>.
- Hemafitria, H., & Octavia, E. O. (2021a). Internalization of Antar Pakatan values in establishment of civic disposition. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 179–190. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40028>.
- Hemafitria, H., & Octavia, E. O. (2021b). Internalization of Antar Pakatan values in establishment of civic disposition. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 179–190. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40028>.
- Honingh, M., Bondarouk, E., & Brandsen, T. (2020). Co-production in primary schools: a systematic literature review. *International Review of Administrative Sciences*, 86(2), 222–239. <https://doi.org/10.1177/0020852318769143>.
- Hoskins, B., Saisana, M., & Villalba, C. M. H. (2015). Civic Competence of Youth in Europe: Measuring Cross National Variation Through the Creation of a Composite Indicator. *Social Indicators Research*, 123(2), 431–457. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0746-z>.
- Joseph, P. B., & Mikel, E. (2014). Transformative moral education: challenging an ecology of violence. *Journal of Peace Education*, 11(3), 317–333. <https://doi.org/10.1080/17400201.2014.954363>.
- Kahne, J., Bowyer, B., Marshall, J., & Hodgins, E. (2022). Is Responsiveness to Student Voice Related to Academic Outcomes? Strengthening the Rationale for Student Voice in School Reform. In *American Journal of Education* (Vol. 128, Number 3).
- Keating, A., & Janmaat, J. G. (2016). Education through citizenship at school: Do school activities have a lasting impact on youth political engagement? *Parliamentary Affairs*, 69(2), 409–429. <https://doi.org/10.1093/pa/gsv017>.
- Khairani, C., & Purba, B. (2024). *BUILDING MORAL CHARACTER IN STUDENTS LEARNING CITIZENSHIP EDUCATION*. 2, 115–118.
- Knowles, R. T., & Suganda, L. A. (2023). Rethinking Classroom Climates: Exploring Civic Education in Indonesia Using Data from the International Civic and Citizenship Study. In *Proceedings of the Fifth Sriwijaya University Learning and Education International Conference (SULE-IC 2022)* (pp. 219–232). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-010-7_25.
- Komalasari, K., & Sapriya, J. (2016). Living values education in teaching materials to develop students' civic disposition. *New Educational Review*, 44(2), 107–121. <https://doi.org/10.15804/ner.2016.44.2.09>.
- Latipa, L., Sulistyarini, S., & Atmaja, T. S. (2022). PEMBENTUKAN CIVIC DISPOSITION PADA PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA SINGKAWANG. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(7), 507. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i7.55984>.
- Lickona, T. (1996). “Eleven Principles of Effective Character Education.” *Journal of Moral Education*, 25(1), 93–100.
- Maizul Habibah, S., & Sapriya. (2021). Global Citizenship Education; A Framework of Civic Literacy in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 625–628.
- Muetterties, C. C. (2024). Recentering Civics: A Framework for Building Civic Dispositions and Action Opportunities. *Democracy & Education*, 30(1), 1–14. <http://democracyeducationjournal.org/home/vol30/iss1/3>.
- Muhassanah, aini, Nur Rizal, M., & Inayah, S. (2024). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka di TPA Raudhotul Jannah. In *Jurnal Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* (Vol. 2, Number 1).
- Mulyono, B. (2017a). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. In *Jurnal Civics* (Vol. 14).
- Mulyono, B. (2017b). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. In *Jurnal Civics* (Vol. 14).
- Narvaez, D., & Lapsley, D. K. (2008). TEACHING MORAL CHARACTER: TWO ALTERNATIVES FOR TEACHER EDUCATION. *The Teacher Educator*, 43(2), 156–172. <https://doi.org/10.1080/08878730701838983>.
- Nur Fadhillah, D. (2020). The Engagement of Learning Management on Civic Education for Civic Disposition Building in Senior High School. *Journal*

- of Social Studies Education Research Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, 11(3), 134–155. www.jsser.org.
- Owen, D. (2015). *High School Students' Acquisition of Civic Disposition: The Impact of We the People*. Georgetown University.
- Rachman, A., Putro, H. Y. S., Rusandi, M. A., & Situmorang, D. D. B. (2024). The development and validation of the “Kuesioner Tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila” (KT P5): A new tool for strengthening the Pancasila Student Profile in Indonesian pioneer schools. *Heliyon*, 10(16). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35912>.
- Sari, F. A. (2024). The Global Citizenship Education: Urgency and strategy forming inclusive global citizen. *Journal of Civics and Moral Studies*, 9(3), 76–83.
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Damiani, V., & Friedman, T. (2022). *Education for Citizenship in Times of Global Challenge IEA International Civic and Citizenship Education Study 2022 International Report (Revised edition) IEA International Civic and Citizenship Education Study 2022*.
- Sellami, I., Amin, H., Ozturk, O., Zaman, A., Sever, S. D., & Tok, E. (2025). Digital, localised and human-centred design makerspaces: nurturing skills, values and global citizenship for sustainability. *Discover Education*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00413-w>.
- Simonova, P., Cincera, J., Kroufek, R., Krepelkova, S., & Hadjichambis, A. (2019). Active citizens: Evaluation of a community-based education program. *Sustainability (Switzerland)*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/su11030663>.
- Soy, A., Nayak, A., & Aggarwal, R. (2025). Structural equation modelling of community participation and subjective wellbeing. TPM: Testing, Psychometrics. *Methodology in Applied Psychology*, 34, 859–864.
- Tomé, V., Lopes, P., & Reis, B. (2019). Active Citizenship and Participation through the Media: A Community Project Focused on Pre-School and Primary School Children. *Comunicação e Sociedade*, 36, 101–120.
- Treviño, E., Carrasco, D., Claes, E., & Kennedy, K. J. (2021). *IEA Research for Education 12 A Series of In-depth Analyses Based on Data of the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Good Citizenship for the Next Generation A Global Perspective Using IEA ICCS 2016 Data* (S. Hegarty & L. Rutkowski, Eds.; Vol. 12). Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-75746-5>.
- Veugelers, Wiel. (2023). *Moral and political dimensions of critical-democratic citizenship education: enhancing social justice, a global orientation, and equity in schools and society*. Brill.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan PKn*. Alfabeta.
- White, E. S. (2021). Parent values, civic participation, and children's volunteering. *Children and Youth Services Review*, 127. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106115>.
- Winataputra, U. S. (2015). *Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis HistorisEpistemologis*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Yua, E., Raymond-Yakoubian, J., Aluaq Daniel, R., & Behe, C. (2022). A framework for co-production of knowledge in the context of Arctic research. *Ecology and Society*, 27(1). <https://doi.org/10.5751/ES-12960-270134>.
- Zhang, Y., Quaranta, M., & Triventi, M. (2025). Is political interest tracked in schools? Evidence from Germany. *Social Science Research*, 132.